

PELANTIKAN DIGELAR SERENTAK SE INDONESIA

Tancap Gas, PPS Langsung Dihadapkan Tahapan Pemilu 2024

YOGYA (KR) - Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang baru saja dilantik dituntut untuk tancap gas dalam bertugas. Hal ini karena badan adhoc di tingkat kelurahan tersebut langsung dihadapkan dengan tahapan Pemilu 2024.



Prosesi pelantikan 135 PPS Kota Yogya untuk Pemilu 2024.

KR-Ardhi Wahdan

Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan, menjelaskan hanya sehari setelah dilantik sejumlah bidang ketugasan sudah di depan mata. "Memang tancap gas. Setidaknya ada dua hal yang langsung dihadapi. Besok tanggal 26 Januari 2023 kami menyiapkan proses verifikasi faktual bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kemudian di tanggal yang sama juga ada proses seleksi Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlil). Itu semua butuh peran PPS," jelasnya di sela pelantikan PPS Kota Yogya di Rich Jogja Hotel, Selasa (24/1).

Pelantikan PPS tersebut digelar serentak se Indonesia. Khusus di Kota Yogya total ada 135 orang yang tersebar di 45 kelurahan. Tiap kelurahan terdapat tiga

orang PPS. Setelah pelantikan pun langsung dilanjutkan dengan bimbingan teknis (bimtek) untuk mengenalkan ketugasannya.

Hamdan menambahkan, dalam menjalankan tugas verifikasi faktual atas dukungan bakal calon DPD sangat mengandalkan petugas yang ada di daerah. Pasalnya, pihaknya telah menetapkan sampel pendukung yang perlu diklarifikasi secara langsung. "Harapan kami mereka mampu bekerja dengan penuh tanggung jawab, berintegritas dan bekerja sama demi tegaknya demokrasi," imbuhnya.

Senada diungkapkan Ketua KPU Kota Yogya Hidayat Widodo. Menurutnya, PPS yang baru dilantik akan langsung bekerja dalam tahapan Pemilu 2024. KPU

Kota Yogya bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berhasil memetakan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mencapai 1.386 TPS. Jumlah tersebut bertambah 13 TPS dibanding pemilu sebelumnya.

Seiring telah ditentukan jumlah TPS maka pihaknya akan langsung menjangking Pantarlil. Personelnya pun disesuaikan dengan jumlah TPS yakni 1.386 orang. "Peran PPS sangat dibutuhkan dalam menjangking Pantarlil. Rekrutmen akan kami mulai 26-31 Januari 2023. Selanjutnya dilantik pada 6 Februari 2023," terangnya.

Oleh karena itu, PPS yang baru dilantik harus mampu memahami ketugasannya dengan baik. Dirinya pun optimis, dengan kebersamaan yang dibangun kelak

berbagai persoalan yang ditemui di wilayah bisa segera diantisipasi dengan baik.

Sementara Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Yogya Yuniarto Dwisutono, berharap jajaran PPS mampu menjadi baris garda terdepan dalam menggerakkan sendi-sendi demokrasi. Hal ini karena badan adhoc tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu, maka kiprahnya sangat strategis. "Penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab yang berat. Pemerintahan yang efektif sangat tergantung dari kepemimpinan. Pemilihan pemimpin itu pun tergantung dari kualitas pemilu yang berintegritas," tandasnya. (Dhi)-f

LEWAT KKN TERKONSOLIDASI

Pemda DIY-UGM Sinergikan Program Pembangunan Desa

YOGYA (KR) - Rencana UGM untuk melaksanakan program KKN yang terkonsolidasi dengan program-program pemerintah, mendapat dukungan penuh dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Terlebih saat ini, DIY lebih menitikberatkan pembangunan dari titik terbawah, yaitu pedesaan.

Untuk itu UGM didorong agar bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat dengan lebih nyata. Mengingat desa membutuhkan pengetahuan soal tata kelola yang akuntabel, bersih dan sebagainya.

"UGM menginisiasi program ini sebagai bagian tanggung jawab dari universitas terhadap masyarakat. Kita lebih banyak ke pengembangan desa khususnya. Beliau (Sultan HB X) menginginkan supaya universitas mempunyai kontribusi yang nyata untuk pengembangan desa. Jadi melalui KKN apa yang dibutuhkan, dikembangkan di desa itu dapat dibantu universitas melalui tangan-tangan mahasiswa KKN dan kegiatan KKN," kata Rektor UGM Prof Dr Ova Emilia MMed Ed SpOG(K) PhD didampingi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,

Pengabdian Masyarakat dan Alumni UGM Dr Arie Sudjito MSI beserta rombongan usai bersilaturahmi dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Selasa (24/1).

Ova mengatakan, masing-masing desa mempunyai permasalahan sendiri yang tidak bisa disamaratakan penanganannya. Oleh karena itu, UGM akan menyusun program KKN yang dikerjasamakan dengan Pemda DIY sehingga bisa mendapatkan sinkronisasi penanganan permasalahan.

"Kehadiran teman-teman KKN itu akan menjadi sebagai fasilitator Agent of Change. Kemudian membuka mata dari penduduk setempat untuk mungkin mengembangkan entah itu UMKM-nya atau apapun kegiatan-kegiatan produktif," ungkap Ova.

Sementara itu Arie Sudjito menyatakan, program KKN tersebut selain menggandeng Pemda DIY, juga akan menggandeng perguruan-perguruan tinggi lain di DIY. Dengan adanya model kolaborasi, nantinya diharapkan akan banyak menangani penanggulangan kemis-

kinan, program-program digitalisasi dan segala yang dibutuhkan desa.

"Banyak perguruan tinggi di DIY yang memiliki program KKN. Biasanya program ini berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkonsolidasi dan terintegrasi dengan baik. Sehingga, UGM mencoba merancang program KKN yang saling terhubung dengan perguruan tinggi lain dan pemerintah," terangnya.

Menurutnya, konsolidasi program KKN ini diharapkan mampu menyelaraskan agenda-agenda pemerintah dengan berbagai perguruan tinggi. Hal ini sebagai wujud nyata atas kontribusi perguruan tinggi bagi masyarakat.

Selama ini, masing-masing perguruan tinggi sudah melakukan KKN, dan berjalan baik. Namun, hasil maksimal akan didapat jika semua terkonsolidasi dengan baik. Kerentanan di bidang ekonomi, di bidang pengangguran, kemiskinan atau kebencanaan, akan mampu ditangani dengan konsolidasi antara pemerintah dan perguruan tinggi.

"Dulu perguruan tinggi membuat KKN sendiri-sendiri, nah kita ingin membuat KKN yang terkonsolidasi

antara masing-masing perguruan tinggi dan Pemda. Dengan begitu nanti agenda untuk mengerjakan secara fokus itu digarap bareng-bareng, sehingga bisa terukur. Ini bagian dari tanggung jawab sosial kita, kita akan inisiatif mengumpulkan teman-teman perguruan tinggi," jelasnya.

Ditambahkannya, program dari Pemda dan universitas akan disambungkan karena desa mempunyai resource dan RPJM Desa. Begitu pula dengan provinsi dan kabupaten. Sehingga apabila berjalan sendiri-sendiri tidak akan efektif. Untuk itu pihaknya dan tim akan segera menggarap bersama perguruan tinggi lainnya melalui kelas sharing sebagai awal.

"Mulai Februari ini akan kita uji-cobakan, dan akhir Januari akan kita undang perguruan-perguruan tinggi untuk membuat desain. Memang secara informal sudah kami kontak, tetapi kami membutuhkan arahan dari Gubernur DIY dan kira-kira yang mau dipecahkan teka-teki soal prioritasnya apa. Misalnya kemiskinan, ekologi, konflik sosial seperti klitih dan lainnya," imbuah Arie. (Ria)-f

GANDENG TAKMIR MASJID SE KOTA YOGYA

Kemenag Bertekad Berdayakan Ekonomi Umat



KR-Istimewa

Kepala Kantor Kemenag Kota Yogya memberikan pemaparan dalam FGD bersama takmir masjid se Kota Yogya.

YOGYA (KR) - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Yogya bertekad untuk memberdayakan ekonomi umat berbasis masjid. Sehingga tempat ibadah umat muslim tersebut tidak sekadar untuk salat dan mengaji melainkan aktivitas produktif lainnya.

Tekad tersebut disampaikan Kepala Kantor Kemenag Kota Yogya H Nadiyah MSI dalam Focus Group Discussion (FGD) di aula Masjid Syuhada, Selasa (24/1). FGD tersebut melibatkan para takmir masjid se Kota Yogya dengan mengangkat tema pemberdayaan ekonomi umat. "Kami ingin Masjid tidak hanya sekadar tempat salat. Tetapi peran sosial keumatan, pembinaan jamaah, ekonomi, dan pendidikan bisa dijalankan," ungkapnya.

Menurutnya masjid harus dikelola secara profesional, moderat dan berdaya untuk mensejahterakan jamaah. Ia pun mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara beberapa pihak sehingga kegiatan yang diikuti 175 peserta tersebut bisa berjalan.

Sementara itu Pj Walikota Yogya Sumadi SH MH, menyebut agar masjid bisa adil dan inklusif dalam mengembangkan potensi ekonomi tanpa diskriminasi. "Kami berharap masjid bisa ikut memberdayakan masyarakat. Karena hal tersebut bukan hanya tanggung jawab Pemkot tetapi butuh kerja sama dengan takmir," harapnya.

Pada kesempatan itu Sumadi juga memberikan sosialisasi terkait tahapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan. Terutama menyangkut aturan kampanye yang dijabarkan dalam undang-undang. Di dalamnya diatur terkait tempat yang diperbolehkan dan dilarang untuk aktivitas politik pada saat pelaksanaan kampanye.

Sementara Kepala Kanwil Kemenag DIY Dr H Masmin Afif MAG, berharap masjid bisa menumbuhkan nilai-nilai moderasi sehingga tercipta kehidupan harmonis. Dalam kesempatan tersebut juga hadir sekretaris Yayasan Masjid Syuhada, Bawaslu Kota Yogya dan Kepala Cabang BSI Yogya yang menjelaskan pentingnya masjid berdaya melalui layanan digital. (Dhi)-f

Sejumlah Bangunan di Kotagede Layak Jadi BCB

YOGYA (KR) - Sejumlah bangunan berusia tua yang berada di kawasan Kotagede layak untuk menjadi bangunan cagar budaya (BCB). Selain berusia tua, bangunan cagar budaya yang ditetapkan juga harus mengandung nilai sejarah.

Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogya Susilo Munandar, mengungkapkan tiap tahun pihaknya menargetkan mampu mengusulkan 20 bangunan yang berpotensi dapat ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya baru. "Jumlah tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DIY. Untuk di Kota Yogya, potensi bangunan cagar budaya cukup banyak," ungkapnya, Selasa (24/1).

Hingga saat ini tercatat ada 179 bangunan cagar budaya yang ada di Kota Yogya. Seluruhnya telah mendapatkan pengesahan di tingkat nasional, provinsi maupun kota. Sedangkan pada tahun ini pihaknya memfokuskan usulan penambahan bangunan cagar budaya baru dari kawasan Kotagede yang menjadi salah satu dari lima kawasan cagar budaya di Kota Yogya.

"Konsentrasi utamanya memang di Kotagede, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengusulkan bangunan yang berpotensi menjadi bangunan cagar budaya dari seluruh wilayah di Kota Yogya yang tidak harus dari kawasan cagar budaya," imbuhnya.

Selain Kotagede, empat kawasan cagar budaya lainnya yakni Kraton, Pakualaman, Kotabaru dan Malioboro. Sedangkan sejumlah bangunan di Kotagede yang berpotensi memenuhi syarat untuk menjadi bangunan cagar budaya atau bangunan warisan budaya di antaranya Babon Anim di depan Pasar Kotagede, Bokong Semar, Benteng Cepuri, hingga Pacak Suji.

Menurut Susilo, bangunan-bangunan di Kotagede tersebut mampu memenuhi kriteria sebagai bangunan cagar budaya. Seperti berusia minimal 50 tahun, mewakili gaya bangunan yang sama selama 50 tahun terakhir, dan memiliki nilai penting untuk sejarah, pendidikan, agama, atau masyarakat. "Misalnya Pacak Suji yang memiliki nilai penting sebagai monumen penobatan Sri Sultan HB IX," tandasnya. (Dhi)-f

Sekolah Dampingi Pemilihan Jurusan

YOGYA (KR) - Tahapan awal Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) berupa registrasi akun SNPMB bagi sekolah dan siswa, sudah mulai dilakukan. Proses registrasi untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) sudah bisa dilakukan pada 9 Januari 2023. Registrasi akun SNPMB bagi sekolah akan berakhir pada 9 Februari 2023.

Sementara untuk masa pendaftaran registrasi akun SNPMB yang diperuntukkan khusus bagi siswa lulusan 2023 yang akan mengikuti SNBP akan berakhir pada 15 Februari. Karena kesuksesan SNPMB tidak bisa dipisahkan dalam kecermatan pemilihan jurusan. Sejumlah sekolah di DIY melakukan pendampingan bagi siswa, supaya mereka bisa memilih jurusan sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki.

"Ketatnya persaingan dalam SNPMB menuntut siswa harus selektif dalam pemilihan jurusan di Perguruan Tinggi (PT). Pasalnya jika mereka sampai salah dalam memilih jurusan, bisa-bisa tidak lolos seleksi. Supaya hal itu tidak terjadi kami melakukan beberapa pendampingan, mulai dari pembuatan akun SNPMB, fiksasi jurusan dan pendampingan untuk lolos SNBP 2023 sampai layanan konsultasi beasiswa studi," kata Kepala SMAN 1 Yogyakarta, Drs Jumadi MSI di Yogyakarta, belum lama ini. (Ria)-f

SINKRONISASI DATA KTP ELEKTRONIK

100 Pemilih Pemula Ditargetkan Rekam Kependudukan

YOGYA (KR) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikapil) Kota Yogya menargetkan seluruh pemilih pemula pada Pemilu 2024 mendatang sudah melakukan perekaman data kependudukan. Hal ini supaya mereka sudah masuk dalam database KTP elektronik.

Kepala Dindikapil Kota Yogya Septi Sri Rejeki, mengungkapkan hingga saat ini yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik mencapai 99,37 persen. "Sejak akhir tahun lalu kami sudah gencar mengajak para pemilih pemula untuk merekam data kependudukan.

Harapannya menjelang Pemilu 2024 semuanya sudah merekam," jelasnya, Senin (23/1).

Perekaman data kependudukan tidak hanya dilakukan di Kantor Dindikapil Kota Yogya dan Mal Pelayanan Publik (MPP). Dindikapil Kota Yogya sudah menjadwalkan agenda layanan rekaman kependudukan dengan jemput bola ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Yogya. Upaya tersebut dilakukan bekerja sama dengan sekolah dan kemitraan.

Septi mengatakan, bagi penduduk Kota Yogya yang sudah berusia 16 tahun dapat melakukan perekaman

data kependudukan. Akan tetapi KTP elektroniknya baru akan diberikan pada saat usia 17 tahun. "Nantinya semua pemilih pemula ini jika melakukan perekaman KTP elektronik menjadi salah satu syarat wajib mengikuti Pemilu 2024," jelasnya.

Sampai saat ini antusias pemilih pemula dinilai Septi sangat luar biasa. Bahkan jika ada warga berdomisili Kota Yogya namun sekolah di luar daerah akan difasilitasi layanan jemput bola di wilayah. Hal ini dilakukan agar perekaman KTP elektronik dapat terlaksana secara merata.

Sementara itu sejauh ini

Dindikapil Kota Yogya mencatat jumlah wajib KTP sebanyak 318.059 orang. Namun jumlah warga yang sudah melakukan rekam KTP baru 316.064 orang. (Dhi)-f

Kenaikan Biaya Haji

Rasionalisasi Keuangan dan Lindungi Hak Calon Jemaah

YOGYA (KR) - Pemerintah dalam rapat bersama Komisi VIII DPR mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2023 sebesar Rp 69.193.733. Bipih merupakan komponen biaya yang dibayar jemaah haji.

Jumlah Bipih yang diusulkan tahun ini sebesar 10 persen dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp 98.893.909. Sisanya sebanyak 30 persen (Rp 29.700.175) diambilkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.

Menurut Kakanwil Kemenag DIY Dr Masmin Afif, kebijakan ini merupakan langkah tegas yang ditempuh Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas. "Menteri Agama berani mengambil langkah tidak populer justru untuk melindungi hak jutaan calon jemaah haji yang saat ini masuk dalam waiting list," ungkap Masmin Afif, Selasa (24/1).

Menag Yaquut imbuah Kakanwil, berupa melakukan rasionalisasi keberlangsungan dan kesehatan keuangan haji. iSebab, selama ini komponen BPIH juga ditopang dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji terlalu besar dan cenderung tidak sehat. Maka dari itu, harus ada langkah berani untuk mengoreksi dan menyeimbangkan. Hak dan kepentingan jutaan jemaah haji tunggu juga harus dilindungi. Dan itu dilakukan Gus Men," tandas Masmin.

Sebelumnya, Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menilai usulan biaya haji yang diajukan pemerintah sebagai konsekuensi yang sulit dihindari. "Kenaikan biaya haji ini sulit dihindari karena dipicu oleh kenaikan berbagai komponen kebutuhan, baik di tanah air maupun di Arab Saudi," ujar Mustolih dalam keterangan pers sebagaimana dikutip dari laman kemenag.go.id. (Feb)-f

YAYASAN
Bunga Selasih
PENGAJIAN SEKAR TELASIH
Hari : Ahad Kliwon
Tanggal : 29 Januari 2023
Jam : 09.00 - 11.00 WIB
Tempat : Kantor Yayasan Bunga Selasih
Penceramah :
H. Charis Thohari Rohman, S.Th., I.M., SI
Kantor:
Sendowo Blok B no. 42 B, Sinduadi, Mlati,
Sleman, Yogyakarta 55284
Telp. (0274) 550-444 Faks. (0274) 540-555